

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu misi pemerintahan Indonesia saat ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih. Seiring dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan pengelola keuangan, instansi pemerintah diwajibkan melakukan pengelola keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan system pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi dan pengembangan khususnya di bidang akuntansi pemerintahan, yang berkesinambungan sehingga terbentuk system yang tepat. Negara Indonesia telah menerapkan standar akuntansi pemerintahannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang sekarang telah diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan atau Laporan Keuangan Pemerintah adalah bentuk pertanggung jawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pemerintah Pusat, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi finansial yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal.

Isu mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat untuk diperbincangkan, banyaknya kasus-kasus buruk mengenai kualitas laporan keuangan pemerintahan di Indonesia. Rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintahan, kurangnya pengetahuan staf pengelola yang ada dan penyediaan sarana dan prasarana yang belum memadai. Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel mendorong pemerintah untuk terus berupaya memperbaiki system akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi berbasis akrual menjadi isu yang sangat penting di era reformasi untuk menciptakan *good government governance*.

Adapun perubahan perlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Masalah yang paling mendasar adalah terkait sumber daya manusia oleh pemerintah yang kurang memadai dalam pengelolaan keuangan. Tentunya hal ini sangatlah mempengaruhi kesiapan



pemerintah tersebut dalam menerapkan system akuntansi berbasis akrual. Selanjutnya, infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual penuh membutuhkan sumber daya teknologi informasi yang lebih tinggi. Ketersediaan sarana dan prasarana yang tepat akan bisa mendukung terwujudnya penerapan standar akuntansi pemerintahan berjalan dengan efektif.

Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik ( Ditjen IDP ) adalah instansi pemerintah unit Eselon I yang berada di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang dilihat dari segi anggaran yang di kelola memiliki kedudukan penting dari satuan kerja lainya dan dari pengelola anggaran tersebut berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan. Setiap pemerintah provinsi/kota/daerah beserta seluruh badan, dinas dan instansi pun harus mampu membuat laporan keuangan. Jika dalam perusahaan menggunakan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan, lain hal nya di pemerintahan yang menggunakan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) sebagai pedomannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti ingin meneliti kembali mengenai judul **“PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP), PENGETAHUAN PENGELOLA DAN KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA DITJEN INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI”**.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI?
2. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan pengelola laporan keuangan dalam penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI?
3. Apakah terdapat pengaruh ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI?
4. Apakah terdapat pengaruh penerapan SAP, pengetahuan pengelola laporan keuangan, serta ketersediaan sarana dan prasarana terhadap kualitas laporan keuangan Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI?

## 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pada Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI;



2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pengelola laporan keuangan dalam penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pada Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI;
3. Untuk mengetahui pengaruh ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pada Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI;
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan SAP, pengetahuan pengelola laporan keuangan, serta ketersediaan sarana dan prasarana terhadap kualitas laporan keuangan pada Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI.

#### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat, antara lain:

1. Bagi Peneliti  
Sebagai sarana bagi peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan serta mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan terutama pada penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dapat dijadikan dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Bagi Instansi  
Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi pada sektor publik, khususnya berkaitan dengan akuntansi pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.
3. Bagi Pembaca

Dapat memberikan tambahan informasi bagi para pembaca yang ingin menambah wacana pengetahuan khususnya di bidang akuntansi sektor publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah sehingga pembaca dapat lebih memahaminya.

